



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 6885-6892

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dinamika Inflasi Indonesia dalam Perspektif Moneter dan Ekonomi Islam

Varisa Afriani Putri, Hendra Riofita

Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

varisaafrianiputri@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika inflasi di Indonesia melalui perspektif moneter, struktural, dan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif berdasarkan berbagai buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor moneter seperti jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga oleh hambatan struktural yang berasal dari keterbatasan kapasitas produksi, inelastisitas sektor pangan, serta ketergantungan terhadap barang impor yang memicu imported inflation. Kajian ini juga menemukan bahwa hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat nonlinear, dimana inflasi yang rendah dan stabil dapat mendorong aktivitas produksi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang tinggi menurunkan daya beli, meningkatkan ketidakpastian, dan menghambat pertumbuhan. Selain itu, kebijakan moneter melalui pengaturan suku bunga efektif mengendalikan inflasi dalam jangka pendek, namun berpotensi menekan investasi dan sektor riil apabila diterapkan secara berlebihan. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar yang harus beredar pada sektor riil untuk mendukung distribusi ekonomi yang adil dan stabilitas harga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi memerlukan sinergi kebijakan moneter dan penguatan sektor riil guna mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.

Kata kunci: Inflasi, Kebijakan Moneter, Hambatan Struktural, Ekonomi Islam, Pertumbuhan Ekonomi.

1. Latar Belakang

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Di Indonesia, inflasi menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, stabilitas harga, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, inflasi yang stabil dan terkendali merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dinamika inflasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari sisi moneter maupun faktor struktural ekonomi.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya memandang inflasi sebagai fenomena moneter yang dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, menurunkan efisiensi pasar, serta memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa inflasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, juga dipengaruhi oleh hambatan struktural seperti ketidakseimbangan distribusi barang, rendahnya produktivitas sektor pangan, dan ketergantungan terhadap barang impor. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan inflasi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan hanya melalui kebijakan moneter.

Implementasi kebijakan moneter di Indonesia juga menghadapi dilema tersendiri. Upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga sering kali berdampak pada sektor riil. Tingginya suku bunga dapat meningkatkan biaya pinjaman dan menekan aktivitas investasi maupun produksi. Selain itu, data inflasi antarwilayah di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan tingkat inflasi yang dipengaruhi oleh kondisi produksi, distribusi, dan kebijakan harga di masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika inflasi di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks dan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor moneter semata.

Kompleksitas inflasi di Indonesia juga semakin terlihat dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan tingginya keterbukaan perdagangan internasional. Perubahan harga komoditas dunia, gangguan rantai pasok global, serta fluktuasi nilai tukar dapat memberikan dampak langsung terhadap harga barang dan jasa di dalam negeri. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor untuk sejumlah bahan baku dan barang modal, Indonesia rentan terhadap tekanan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global.

Selain itu, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. Perbedaan kondisi infrastruktur, biaya distribusi, serta tingkat ketersediaan barang antarwilayah sering menyebabkan terjadinya disparitas harga. Pada beberapa daerah, keterbatasan akses transportasi dan distribusi dapat mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi memerlukan koordinasi yang tidak hanya melibatkan kebijakan moneter, tetapi juga kebijakan sektor riil, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sistem distribusi nasional.

Di sisi lain, terdapat pendekatan yang berbeda dalam memahami inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar yang harus beredar dalam aktivitas sektor riil, bukan sebagai komoditas yang ditimbun untuk memperoleh keuntungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemerataan distribusi ekonomi serta stabilitas kegiatan produksi guna menjaga keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian yang menggabungkan perspektif moneter, struktural, dan ekonomi Islam dalam menganalisis inflasi di Indonesia masih tergolong terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami dinamika inflasi Indonesia secara komprehensif melalui integrasi ketiga perspektif tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dinamika inflasi di Indonesia dengan meninjau faktor moneter, hambatan struktural, serta perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi resmi dari lembaga terkait, guna memperoleh landasan teoritis dan empiris yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui e-jurnal, e-book, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik inflasi, kebijakan moneter, serta perspektif ekonomi Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, relevansi topik, serta tingkat kebaruan publikasi. Di sisi lain, perspektif ekonomi Islam memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami inflasi. Dalam sistem ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar yang harus beredar dalam aktivitas sektor riil, bukan sebagai komoditas yang ditimbun untuk memperoleh keuntungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemerataan distribusi ekonomi serta stabilitas kegiatan produksi guna menjaga keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian yang menggabungkan perspektif moneter, struktural, dan ekonomi Islam dalam menganalisis inflasi di Indonesia masih tergolong terbatas.

3. Hasil dan Diskusi

Model Inflasi di Negara Berkembang

Banyak studi menunjukkan bahwa inflasi di negara berkembang bukan hanya fenomena moneter, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor struktural atau yang sering disebut inflasi dorongan biaya. Hal ini terkait dengan struktur ekonomi negara berkembang yang umumnya masih didominasi sektor agraris dan terbatasnya kapasitas produksi. Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, perekonomian negara berkembang cenderung rentan terhadap guncangan dari dalam maupun luar negeri, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan harga (Todaro & Smith, 2015).

Guncangan domestik, misalnya gagal panen karena perubahan iklim atau bencana alam, serta faktor eksternal seperti memburuknya *terms of trade*, kenaikan utang luar negeri, dan fluktuasi nilai tukar, dapat mendorong kenaikan harga di pasar dalam negeri. Keadaan ini mencerminkan adanya hambatan struktural dalam perekonomian yang memperkuat tekanan inflasi (Jhingan, 2010).

Kendala struktural tersebut biasanya muncul dalam beberapa aspek utama. Pertama, pasokan dari sektor pertanian cenderung kurang elastis karena teknologi yang masih sederhana, sehingga tidak mampu mengikuti kenaikan permintaan. Kedua, keterbatasan cadangan devisa membatasi kemampuan untuk mengimpor barang modal, bahan baku, dan barang antara, yang menghambat proses industrialisasi. Selain itu, efek demonstrasi mendorong perubahan pola konsumsi ke arah barang impor (Todaro & Smith, 2015). Ketiga, terbatasnya penerimaan pemerintah sering menyebabkan defisit anggaran yang dalam beberapa kasus dibiayai melalui pinjaman luar negeri atau pencetakan uang, sehingga berpotensi memperburuk tekanan inflasi (Jhingan, 2010).

Keberadaan hambatan struktural tersebut membuat inflasi di negara berkembang cenderung bersifat tahan lama dan tidak mudah diatasi hanya dengan kebijakan moneter jangka pendek. Hal ini berbeda dari pandangan kaum monetaris yang menganggap inflasi terutama disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan. Sebaliknya, pendekatan neo-strukturalis menekankan bahwa inflasi juga dipengaruhi oleh kondisi sektor riil dan struktur ekonomi, di mana uang berperan dalam memengaruhi investasi dan produksi. Ketika ketersediaan dana meningkat dan suku bunga menurun, investasi akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan output dan memengaruhi dinamika inflasi dalam jangka panjang (Lance Taylor, 1983).

Dengan demikian, analisis inflasi di negara berkembang memerlukan pendekatan komprehensif yang memperhitungkan interaksi antara faktor moneter dan struktural. Kebijakan yang efektif tidak cukup hanya menargetkan pengendalian jumlah uang beredar, tetapi juga harus mencakup upaya memperbaiki kapasitas produksi dan memperkuat struktur ekonomi.

Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator makroekonomi yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam suatu perekonomian. Kedua variabel ini saling memengaruhi dan sering kali menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan ekonomi suatu negara. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil umumnya dianggap mampu menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas harga memberikan kepastian bagi rumah tangga, pelaku usaha, maupun investor dalam merencanakan kegiatan ekonomi mereka. Menurut N. Gregory Mankiw, inflasi yang terkendali dapat mengurangi ketidakpastian dalam perekonomian sehingga keputusan konsumsi, investasi, dan produksi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Mankiw, 2019). Oleh karena itu, menjaga inflasi pada tingkat yang wajar menjadi salah satu tujuan penting kebijakan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, inflasi yang rendah dan stabil dapat memberikan dorongan positif terhadap aktivitas ekonomi. Ketika harga-harga mengalami kenaikan dalam batas yang wajar, pelaku usaha cenderung memiliki keyakinan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi karena adanya harapan memperoleh keuntungan yang lebih baik. Peningkatan produksi tersebut dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu, inflasi yang moderat juga dapat menjadi indikator meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kondisi ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi baru guna memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Sejalan dengan pandangan Michael P. Todaro, inflasi ringan dalam negara berkembang dapat berperan sebagai stimulus bagi kegiatan produksi dan investasi sehingga mampu mendukung peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2015).

Meskipun demikian, inflasi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian. Kenaikan harga yang berlangsung secara cepat dan tidak terkendali akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena daya beli pendapatan yang dimiliki semakin menurun. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas dunia usaha. Ketidakpastian yang muncul akibat inflasi tinggi sering membuat pelaku usaha menunda investasi dan mengurangi ekspansi produksi karena sulit memperkirakan biaya maupun keuntungan di masa mendatang. Selain itu, inflasi yang tinggi dapat memperbesar kesenjangan pendapatan karena kelompok masyarakat tertentu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyesuaikan pendapatannya terhadap kenaikan harga. Dalam jangka

panjang, kondisi tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan di masyarakat (Blanchard, 2021).

Di sisi lain, tingkat inflasi yang terlalu rendah atau bahkan mengalami deflasi juga bukan merupakan kondisi yang ideal bagi perekonomian. Inflasi yang sangat rendah sering kali mencerminkan lemahnya aktivitas ekonomi dan rendahnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dalam situasi seperti ini, perusahaan cenderung mengurangi produksi karena pasar tidak mampu menyerap output yang dihasilkan. Pelaku usaha juga menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi karena prospek keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka pertumbuhan ekonomi dapat mengalami stagnasi dan tingkat pengangguran berpotensi meningkat. Oleh sebab itu, banyak negara berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang moderat karena dianggap mampu menciptakan keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, inflasi yang terkendali tidak hanya berfungsi menjaga kestabilan perekonomian, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di Indonesia, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Tingkat inflasi yang terkendali dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong konsumsi dan investasi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, serta mengurangi minat investasi yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang efektif untuk menjaga inflasi pada tingkat yang stabil dan moderat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bersifat non-linear, di mana inflasi pada tingkat tertentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun apabila melebihi batas optimal justru akan menghambat pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menjaga inflasi tetap berada pada tingkat yang stabil dan terkendali.

Pengaruh Kurs Terhadap Inflasi Indonesia

Hubungan antara nilai tukar (*exchange rate*) dan inflasi merupakan aspek penting dalam analisis makroekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam jangka panjang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung mengalami depresiasi sejak krisis ekonomi 1998. Namun pada periode yang sama, tingkat inflasi di Indonesia menunjukkan tren yang relatif menurun dan lebih terkendali, terutama seiring stabilisasi harga komoditas global dan perbaikan kebijakan ekonomi domestik, seperti penguatan kebijakan moneter dan pengelolaan harga komoditas pangan.

Secara teoritis, depresiasi nilai tukar akan meningkatkan harga barang impor, yang selanjutnya mendorong kenaikan harga barang domestik melalui mekanisme *imported inflation*. Namun demikian, hubungan antara nilai tukar dan inflasi tidak selalu bersifat linier. Dalam beberapa kondisi, hasil empiris menunjukkan bahwa nilai tukar dapat memiliki pengaruh negatif terhadap inflasi dalam jangka panjang, yang mencerminkan adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan tingkat harga (N. Gregory Mankiw, 2019).

Pada negara yang menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*), kebijakan moneter ekspansioner, baik melalui peningkatan jumlah uang beredar maupun depresiasi nilai tukar, cenderung mendorong kenaikan inflasi. Ketika nilai mata uang domestik melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga meningkatkan biaya produksi, terutama pada negara yang masih bergantung pada impor bahan baku dan barang modal. Kenaikan biaya tersebut kemudian dapat diteruskan ke harga barang dan jasa di pasar domestik. Hal ini sejalan dengan pandangan Perry Warjiyo yang menyatakan bahwa transmisi nilai tukar terhadap inflasi terjadi melalui kenaikan harga barang impor (*imported inflation*) serta pembentukan ekspektasi inflasi di masyarakat. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat inflasi dalam perekonomian terbuka (Warjiyo & Juhro, 2016).

Namun, dalam jangka pendek, pengaruh nilai tukar terhadap inflasi sering kali tidak signifikan karena perubahan nilai tukar tidak langsung diteruskan ke harga barang dan jasa di dalam negeri. Kondisi ini disebabkan oleh adanya *time lag* dalam proses penyesuaian harga oleh produsen dan pelaku usaha, serta fenomena *exchange rate pass-through* yang tidak sempurna, di mana sebagian kenaikan biaya akibat depresiasi nilai tukar diserap oleh

perusahaan untuk mempertahankan daya saing dan menjaga permintaan konsumen. Selain itu, faktor-faktor seperti persaingan pasar, kebijakan pemerintah, dan kondisi permintaan domestik juga dapat mengurangi dampak perubahan nilai tukar terhadap inflasi, sehingga pengaruhnya umumnya lebih terlihat dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Lebih lanjut, tingkat inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan biaya produksi. Kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah (*administered prices*), seperti penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, dan tarif transportasi, sering kali memberikan dampak yang cukup besar terhadap pergerakan inflasi. Kenaikan harga komoditas pangan juga menjadi faktor penting karena pangan merupakan komponen utama dalam pengeluaran rumah tangga. Ketika harga beras, cabai, bawang, atau komoditas pangan lainnya meningkat, tekanan inflasi cenderung ikut meningkat. Selain itu, kenaikan biaya energi dan transportasi dapat mendorong peningkatan biaya distribusi barang sehingga harga berbagai produk di pasar ikut mengalami kenaikan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pembentukan inflasi dibandingkan perubahan nilai tukar, terutama karena dampaknya dirasakan secara langsung oleh produsen maupun konsumen (Bank Indonesia, 2023).

Dengan demikian, hubungan antara kurs dan inflasi di Indonesia bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun kebijakan. Oleh karena itu, analisis inflasi tidak dapat hanya berfokus pada pergerakan nilai tukar, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi dinamika harga dalam perekonomian.

Faktor-Faktor dalam Penawaran Agregat dan Luar Negeri

Kelambanan penyesuaian penawaran agregat terhadap peningkatan permintaan agregat di negara berkembang, termasuk Indonesia, umumnya disebabkan oleh adanya kendala struktural (*structural bottlenecks*) dalam perekonomian. Kendala ini menyebabkan kapasitas produksi tidak dapat dengan cepat merespons peningkatan permintaan, sehingga memicu tekanan inflasi (M. L. Jhingan, 2010).

Salah satu komponen utama yang berkontribusi terhadap inflasi di Indonesia adalah harga bahan pangan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik sektor pertanian yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti penggunaan teknologi yang relatif sederhana, produktivitas yang rendah, serta ketergantungan terhadap faktor alam. Akibatnya, penawaran bahan pangan cenderung bersifat tidak elastis dan seringkali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Kondisi ini dapat menimbulkan *excess demand* yang pada akhirnya menciptakan *inflationary gap* dalam perekonomian (N. Gregory Mankiw, 2019). Selain itu, keterbatasan produksi pangan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman, serta pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian akibat proses industrialisasi. Faktor-faktor tersebut semakin memperkuat kendala struktural dalam sektor riil yang berdampak pada peningkatan harga. Lebih lanjut, hasil studi empiris oleh Sri Mulyani Indrawati (1996) menunjukkan bahwa selain faktor pangan, terdapat beberapa determinan inflasi dari sisi penawaran agregat, yaitu *imported inflation*, *administered prices*, *output gap*, dan tingkat suku bunga.

Pertama, *imported inflation* terjadi akibat tingginya ketergantungan perekonomian terhadap barang impor, baik berupa barang modal, barang antara, maupun bahan baku yang digunakan dalam proses produksi domestik. Ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, biaya impor akan meningkat sehingga harga barang impor menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya tersebut kemudian diteruskan oleh produsen ke harga jual produk di dalam negeri, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat inflasi. Proses ini dikenal sebagai *exchange rate pass-through* atau transmisi nilai tukar terhadap inflasi (Warjiyo & Juhro, 2016). Di Indonesia, fenomena ini sering terjadi karena masih banyak sektor industri yang bergantung pada bahan baku dan barang modal impor, sehingga fluktuasi nilai tukar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan inflasi.

Kedua, *administered prices* merupakan harga barang dan jasa yang ditetapkan atau diatur oleh pemerintah, seperti harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, tarif tol, serta biaya transportasi tertentu. Perubahan harga yang ditetapkan pemerintah dapat secara langsung memengaruhi tingkat inflasi karena barang dan jasa tersebut memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Selain dampak langsung, kenaikan *administered prices* juga dapat menimbulkan efek berantai (*multiplier effect*) terhadap harga barang dan jasa lainnya melalui peningkatan

biaya distribusi dan produksi. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah sering menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan inflasi nasional (Bank Indonesia, 2023).

Ketiga, output gap merupakan selisih antara output aktual yang dihasilkan perekonomian dengan output potensial yang seharusnya dapat dicapai apabila seluruh sumber daya digunakan secara optimal. Apabila permintaan masyarakat meningkat sementara kapasitas produksi belum mampu mengimbangnya, maka akan muncul tekanan kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan barang dan jasa. Sebaliknya, ketika output aktual berada di bawah output potensial, tekanan inflasi cenderung lebih rendah karena masih terdapat kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, kondisi output gap menjadi salah satu indikator penting dalam menganalisis tekanan inflasi dari sisi penawaran maupun permintaan.

Keempat, tingkat suku bunga (interest rate) juga merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi inflasi. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha sehingga biaya produksi dan investasi menjadi lebih besar. Peningkatan biaya tersebut sering kali dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, tingginya suku bunga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Dalam kondisi tertentu, hubungan antara suku bunga dan harga dapat membentuk pola interest rate-price spiral, yaitu suatu kondisi ketika kenaikan suku bunga mendorong kenaikan biaya produksi dan harga, yang kemudian memicu tekanan inflasi lebih lanjut (Blanchard, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan suku bunga yang tepat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan agregat, tetapi juga oleh berbagai faktor dari sisi penawaran dan eksternal. Oleh karena itu, pengendalian inflasi memerlukan kebijakan yang komprehensif yang mencakup stabilisasi sektor moneter sekaligus penguatan sektor riil untuk mengatasi kendala struktural dalam perekonomian. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur dan distribusi, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor. Dengan Langkah yang terintegrasi, pengendalian inflasi tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pengendalian Inflasi di Indonesia

Pengendalian inflasi di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui pendekatan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Instrumen yang digunakan meliputi operasi pasar terbuka (*open market operations*), penetapan suku bunga kebijakan, serta pengaturan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*). Dalam kerangka kebijakan moneter modern, Indonesia telah menerapkan *inflation targeting framework* yang bertujuan menjaga stabilitas harga melalui pengendalian ekspektasi inflasi (Warjiyo & Juhro, 2016).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan moneter memiliki keterbatasan dalam mengendalikan inflasi, terutama ketika tekanan inflasi lebih banyak berasal dari faktor struktural dalam perekonomian. Kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar umumnya lebih efektif untuk mengendalikan inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, tetapi pengaruhnya menjadi terbatas ketika kenaikan harga dipicu oleh gangguan produksi, distribusi, atau kenaikan biaya produksi. Maharani dan Riofita (2024) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan moneter dalam menahan inflasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor riil serta berbagai faktor eksternal, seperti perubahan harga komoditas global dan fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan Bank Indonesia, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas produksi, menjaga kelancaran distribusi barang, serta meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan dari luar negeri.

Pengalaman krisis ekonomi 1997/1998 menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh ekspansi moneter, tetapi juga oleh depresiasi tajam rupiah yang mendorong kenaikan harga barang impor (*imported inflation*) dan memperberat beban utang luar negeri. Dalam situasi tersebut, stabilisasi nilai tukar menjadi langkah krusial untuk meredam tekanan inflasi, karena depresiasi mata uang secara langsung menaikkan biaya produksi dan harga domestik (Perry Warjiyo & Solikin M. Juhro, 2016).

Dalam praktiknya, kebijakan moneter ketat (*tight money policy*) sering digunakan untuk mengendalikan inflasi, misalnya melalui kenaikan suku bunga. Kebijakan ini dapat efektif dalam menekan jumlah uang beredar dan mengurangi tekanan inflasi dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan biaya kredit dan investasi, sehingga berpotensi menekan aktivitas sektor riil. Kondisi ini dapat memicu *cost-push inflation* melalui peningkatan biaya produksi, serta menimbulkan fenomena *interest rate-price spiral* (Olivier Blanchard, 2021).

Kebijakan suku bunga yang terlalu tinggi dalam jangka panjang berisiko menurunkan tingkat investasi dan aktivitas produksi karena meningkatnya biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan menunda ekspansi usaha, mengurangi kapasitas produksi, atau bahkan membatasi kegiatan operasionalnya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat dan kesempatan kerja dapat berkurang. Fenomena ini sering dikaitkan dengan Cavallo effect, yaitu kondisi ketika masyarakat lebih memilih menempatkan dananya pada instrumen keuangan yang menawarkan tingkat pengembalian tinggi dibandingkan menginvestasikannya pada kegiatan produktif di sektor riil. Jika keadaan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, aliran dana ke sektor produktif akan semakin berkurang sehingga menghambat pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dunia usaha, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sistem perbankan karena melemahnya aktivitas ekonomi dan menurunnya permintaan kredit dari sektor produktif (Blanchard, 2021).

Oleh karena itu, pengendalian inflasi di Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan moneter semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif struktural, yaitu melalui perbaikan kapasitas produksi, penguatan sektor pangan, stabilisasi harga komoditas strategis, serta pengelolaan nilai tukar yang stabil. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan strukturalis yang menekankan pentingnya mengatasi hambatan-hambatan struktural (*structural bottlenecks*) dalam perekonomian untuk mencapai stabilitas harga yang berkelanjutan (Jhingan, 2010).

Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia perlu dilakukan secara sinergis antara kebijakan moneter dan kebijakan sektor riil, sehingga tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui pengaturan jumlah uang beredar, suku bunga, atau stabilisasi nilai tukar, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya memperkuat kapasitas produksi nasional, meningkatkan produktivitas sektor pangan serta memperbaiki system distribusi barang dan jasa. Selain itu, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, dan pengurangan ketergantungan terhadap impor juga menjadi Langkah penting untuk mengurangi tekanan inflasi yang bersumber dari faktor struktural. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, stabilitas harga dapat lebih terjaga sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Kesimpulan

Inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek moneter, struktural, dan eksternal. Selain peningkatan jumlah uang yang beredar, inflasi juga disebabkan oleh hambatan struktural seperti keterbatasan kapasitas produksi, ketidakelastisan sektor pangan, serta ketergantungan pada impor yang menimbulkan *imported inflation*. Faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan harga komoditas dunia, dan gangguan rantai pasok global juga turut memengaruhi pergerakan inflasi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inflasi merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan ekonomi saja. Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat non-linear, di mana inflasi yang rendah dan stabil dapat mendorong pertumbuhan, sedangkan inflasi yang tinggi atau tidak stabil justru menghambat aktivitas ekonomi. Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui instrumen moneter efektif dalam jangka pendek, namun belum cukup untuk mengatasi permasalahan struktural. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter dan penguatan sektor riil. Dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas inflasi juga menekankan pentingnya peran sektor riil dan fungsi uang sebagai alat tukar yang produktif. Dengan demikian, pengendalian inflasi di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik. (2026). Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2026.
2. Bank Indonesia. (2023) Laporan Perekonomian Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>
3. Bank Indonesia. (2024). Inflasi dan Kebijakan Moneter. <https://www.bi.go.id>
4. Chapra. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
5. John Maynard Keynes. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
6. Karim. (2010). Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
7. Keynes's. (2023). Inflationary Gap Theory. <https://www.economicdiscussion.net/inflation/keyness-expertise-guide-to-inflation-and-inflationary-process/8125>
8. Lance Taylor. (1983). Structuralist Macroeconomics: Applicable Models for the Third World. New York: Basic Books.
9. M. L. Jhingan. (2010). Macroeconomic Theory. New Delhi: Vrinda Publications.
10. Maharani & Riofit. (2024). Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia. Jurnal Studi Multidisipliner, 8(6). 698-704.
11. Michael P. Todaro., & Stephen C. Smith. (2015). Economic Development (12th ed.). Pearson Education.
12. N. Gregory Mankiw. (2019). Principles of Economics (8th ed.). Cengage Learning.
13. Olivier Blanchard. (2021). Macroeconomics (8th ed.). Pearson Education.
14. Perry Warjiyo., & Solikin M. Juhro. (2016). Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
15. Riofita. (2013). Sistem Ekonomi Islam. PT Sunta Benta Perkasa.
16. S.M. Juhro. (2020). Pengantar kebanksentralan teori dan kebijakan. PT Rajagrafindo Persada: Depok
17. Sri Mulyani Indrawati. (1996). Analisis inflasi di Indonesia.
18. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
19. Sukirno, S. (2006). Makroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.